

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH UNTUK PENDIDIKAN,
KESEHATAN DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP
PDRB DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2012**

Nalyda Yola Althofia

Staff Badan Pusat Statistik

Neli Agustina

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Statistik

Abstract

Labor is part of the population that is capable of doing the work to produce goods and services. Therefore, workers need to be empowered optimally in order to drive the economic process. According to Keynes, one of the efforts that can be done is fiscal policy by increasing government spending leading to a reduction in unemployment. However, in West Java this expectation was not realized. West Java has a large government spending, but its labor absorption is not high. It is shown from the percentage of the working population of the labor force in West Java in 2012 remained below national. This study determines the effect of government education, health and infrastructure expenditures on economic growth and employment in West Java. The recursive equation mode is employed, showing that education and infrastructure spending have positive effect on economic growth and employment. Health expenditure prove to be insignificant. In addition, in West Java, economic growth has positive effect on employment.

Keywords: economic growth, employment, government spending.

I. PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi di Indonesia masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Pada tahun 2012, misalnya, kontribusi nilai tambahnya mencapai 57.62 persen. Sementara kontribusi provinsi-provinsi di kawasan Indonesia Timur masih jauh lebih rendah. Tingginya

lapangan kerja dan perkembangan kegiatan ekonomi membuat masyarakat tertarik untuk mencari pekerjaan di pulau Jawa. Akibatnya, muncul masalah ketenagakerjaan di pulau Jawa serta persebaran angkatan kerja yang tidak merata di Indonesia. Sebagian besar tenaga kerja berada di Pulau Jawa. Pada tahun 2012, 58,94 persen total angkatan kerja di Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa, seperti yang terlihat pada gambar 1(lampiran 1).

Penyerapan tenaga kerja di pulau Jawa tumbuh lebih cepat dari pertumbuhan angkatan kerja pada tahun yang sama, seperti pada Tabel 1. Namun, pertumbuhan angkatan kerja masih berfluktuatif. Oleh karena itu, perlu adanya perluasan kesempatan kerja sehingga angkatan kerja dapat terserap oleh berbagai kegiatan ekonomi dan dapat menurunkan tingkat pengangguran.

Tabel 1. Pertumbuhan angkatan kerja di Pulau Jawa tahun 2009-2012

Tahun	Angkatan Kerja		
	Bekerja (%)	Pengangguran (%)	Angkatan Kerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2009	1,95	-6,90	1,14
2010	1,19	-8,14	0,40
2011	1,17	-3,95	0,77
2012	2,56	-5,94	1,93

Sumber: BPS (diolah)

Menurut Keynes (Sukirno, 2004), pemerintah perlu campur tangan dalam menanggulangi masalah pengangguran. Keynes berpendapat bahwa dalam sistem pasar bebas, penggunaan tenaga kerja penuh tidak selalu tercipta, namun diperlukan usaha dan kebijakan pemerintah untuk menciptakan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Menurutnya, kebijakan fiskal penting untuk mengatasi pengangguran. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah daerah dapat ditingkatkan dan menjadi stimulus untuk memacu perkembangan perekonomian suatu daerah, sehingga diharapkan dapat menaikkan pendapatan daerah. Pengeluaran pemerintah daerah termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mempunyai salah satu fungsinya sebagai fungsi alokasi yang mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran.

Dana tersebut dibelanjakan oleh daerah untuk membiayai operasional pemerintahan dan menangani urusan-urusan yang menjadi kewenangannya, diantaranya pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, sehingga daerah semakin mampu mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah.

Jika dilihat menurut provinsi yang ada di Pulau Jawa, pengeluaran daerah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, seperti ditunjukkan pada gambar 2 (lampiran 2). Seiring dengan meningkatnya pengeluaran daerah, perekonomian di Pulau Jawa juga semakin mengalami kemajuan. Hal ini tergambar dari nilai pertumbuhan PDRB yang semakin naik dari tahun ke tahun. Pencapaian PDRB merupakan salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu daerah. Semakin berkembangnya kegiatan ekonomi maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga akan semakin banyak.

Akan tetapi, kenyataan yang terjadi seperti pada gambar 3 (lampiran 3) persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja di beberapa provinsi di Pulau Jawa masih rendah, yaitu di provinsi Banten dan Jawa Barat. Persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja di Banten tahun 2012 sebesar 89,87 dan di Jawa Barat sebesar 90,92 persen. Artinya, di daerah tersebut masih banyak angkatan kerja yang belum diberdayakan secara penuh.

Jawa Barat memiliki total pengeluaran pemerintah yang besar, namun persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja di daerah tersebut masih berada di bawah angka Nasional, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Selain penciptaan lapangan kerja baru, upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui berbagai program peningkatan mutu SDM, sehingga SDM yang ada mempunyai daya saing yang baik.

Menurut Todaro (2000), pendidikan dan kesehatan merupakan hal yang erat kaitannya dengan modal manusia. Oleh karena itu, program pendidikan dan kesehatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM yang erat kaitannya dengan peningkatan produktivitas. Selain pendidikan dan kesehatan, kondisi infrastruktur yang baik juga akan membawa pengaruh positif pada berbagai sektor perekonomian. Dengan demikian,

pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan penyerapan tenaga kerja pun akan menjadi lebih tinggi. Menurut Prof. Soemitro Djoyohadikoesoemo (Ariesty, 2010), usaha perluasan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan penyelenggaraan proyek pekerjaan umum atau infrastruktur melalui antara lain pembuatan jalan, jembatan, saluran air, dan bendungan.

Dengan mengacu pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan dan melihat fakta bahwa di Jawa Barat pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terus mengalami kenaikan, namun penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut belum sejalan dengan kenaikan pengeluaran pemerintah tersebut. Oleh karena itu, perlu diteliti pengaruh pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat.

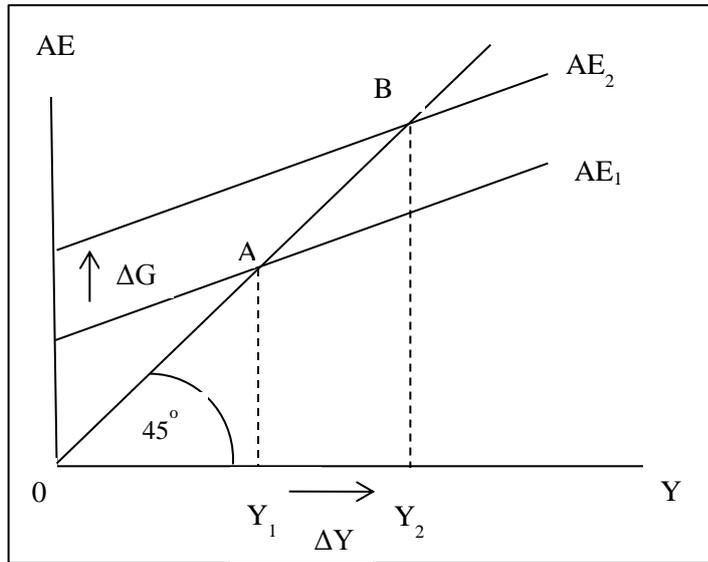
II. METODOLOGI

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran yang dilakukan pemerintah akan mempengaruhi berbagai sektor dalam perekonomian. Adanya pengeluaran pemerintah secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa. Dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan produksi barang dan jasa akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, secara teori kenaikan pengeluaran pemerintah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara teori diterangkan dalam Keynesian Cross (Mankiw, 2003). Pada Gambar 4, kenaikan pengeluaran pemerintah (ΔG) akan meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sebesar jumlah tersebut untuk semua tingkat pendapatan. Peningkatan tersebut berhasil mengubah keseimbangan dari titik A ke titik B, yang berarti terjadi peningkatan pendapatan dari Y_1 ke Y_2 . Kenaikan pendapatan (ΔY) melebihi kenaikan pengeluaran pemerintah (ΔG). Jadi,

pengeluaran pemerintah memiliki dampak pengganda terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan atau tingkat output.



Sumber: Sukirno (2004)

Gambar 1. Efek peningkatan pengeluaran pemerintah

Fungsi pendidikan berkaitan dengan modal manusia. Meningkatnya kesempatan pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas juga akan meningkat. Peningkatan produktivitas akan mampu meningkatkan output yang kemudian akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Menurut Todaro (2000), rendahnya produktivitas di banyak negara berkembang salah satunya bersumber dari lemahnya kesehatan fisik para pekerja. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan pengeluaran untuk fungsi kesehatan akan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih merata kepada masyarakat, sehingga sumber daya manusia yang sehat menjadi semakin bertambah. Meningkatnya kesehatan akan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja sehingga mampu menghasilkan output yang semakin besar. Peningkatan output akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi..

Infrastruktur merupakan suatu sarana fisik pendukung agar pembangunan ekonomi suatu negara dapat terwujud. Kurangnya ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu hambatan utama dalam perbaikan iklim investasi. Oleh karena itu perlu ada kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan infrastruktur. Salah satunya melalui peningkatan pengeluaran pemerintah fungsi perumahan dan fasilitas umum. Peningkatan infrastruktur

mengakibatkan meningkatkan iklim usaha dan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah sumber daya manusia saja, tetapi lebih menekankan pada efisiensi mereka. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dapat berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan tingkat partisipasi sumber daya manusia yang terlibat dalam dunia kerja atau tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi.

Dengan semakin banyaknya masyarakat yang terlibat dalam dunia kerja atau tenaga kerja yang ikut terlibat dalam proses produksi, akan menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah, sehingga mengakibatkan tingkat pendapatan suatu daerah ikut meningkat akibat barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah, dan hal ini akan memberi dampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Pendidikan memiliki keterkaitan dengan penyerapan tenaga kerja. Ketika pendidikan dari tenaga kerja semakin tinggi maka kesempatan kerja akan semakin besar. Pendidikan juga akan memberikan akreditasi profesional bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja tersebut dapat lebih diperhitungkan oleh penyedia kerja. Perlu campur tangan pemerintah dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa mengenyam pendidikan agar memperoleh kehidupan yang lebih baik, salah satunya yaitu melalui pengeluaran pemerintah. Selain itu, alokasi untuk pendidikan juga ditujukan untuk membangun sarana prasarana seperti pembangunan sekolah. Proses pembangunan tersebut membutuhkan pekerja yang kemudian akan berdampak pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Kesehatan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Kesehatan merupakan komponen sumber daya manusia yang paling mendasar. Oleh karena itu, perbaikan kesehatan masyarakat harus diperhatikan untuk membangun generasi yang kompetitif. Perlu ada peran pemerintah melalui alokasi dana untuk fungsi kesehatan yang diharapkan akan memberikan pelayanan kesehatan yang merata bagi masyarakat. Sumber daya manusia yang sehat akan mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja. Selain itu, alokasi untuk fungsi kesehatan juga digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan puskesmas atau rumah sakit yang membutuhkan tenaga kerja dalam proses pembangunannya.

Pengaruh Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur terhadap penyerapan tenaga kerja

Pembangunan infrastruktur yang merupakan proyek padat karya akan menyerap banyak tenaga kerja. Apabila pembangunan infrastruktur berjalan lancar maka penyerapan tenaga kerja dapat ditingkatkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Kabib (2012) bahwa salah satu usaha perluasan lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja dapat dilakukan melalui berbagai proyek pekerjaan umum atau infrastuktur, misalnya pembuatan saluran air, bendungan, jembatan. Dalam melaksanakan proyek infrastruktur diperlukan campur tangan pemerintah, salah satunya dapat berupa pemberian dana melalui kebijakan pengeluaran pemerintah untuk fungsi infrastruktur.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja

Kebijakan fiskal melalui peningkatan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran agregat. Langkah tersebut akan menaikkan PDRB dan tingkat penggunaan tenaga kerja, sebagaimana yang tertera pada persamaan PDRB dengan pendekatan pengeluaran. Peningkatan pengeluaran pemerintah (ΔG) akan berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan dan tingkat output. Peningkatan

besarnya pengeluaran pemerintah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini akan menambah kesempatan kerja.

Akibat pengeluaran pemerintah meningkat, pengeluaran yang direncanakan juga mengalami peningkatan. Namun, ada keterbatasan barang dan jasa yang terproduksi. Oleh karena itu, perusahaan akan meningkatkan output agar produknya dapat sesuai untuk memenuhi rencana pengeluaran. Untuk meningkatkan output, perusahaan akan membutuhkan pekerja lebih banyak sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran (Mankiw, 2003).

Penelitian Terkait

Penelitian Saidah (2011) berjudul Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tertinggal. Dengan menggunakan metode analisis data panel, hasilnya menunjukkan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.

Maharyasa (2011) melakukan penelitian dengan judul Kinerja Keuangan Daerah dan Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah menurut fungsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa dan Bali. Dengan menggunakan metode analisis data panel, menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah fungsi perumahan dan fasilitas umum berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa dan Bali.

Hasil penelitian Desi Dwi Bastian (2010) yang berjudul Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009, dengan menggunakan model *Error Correction Mechanism* (ECM) menyimpulkan dalam jangka pendek hanya variabel pengeluaran pemerintah atas transportasi yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah atas pendidikan, kesehatan dan perumahan tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sementara dalam jangka panjang variabel pengeluaran pemerintah atas perumahan dan transportasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan bertanda positif, sedangkan

variabel pengeluaran pemerintah atas pendidikan dan kesehatan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Hery Ferdinan (2011) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, PDRB, dan Upah Riil Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Barat tahun 1989-2008 melalui *fixed effects model*, disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat sangat dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, PDRB, dan upah riil.

Lisbeth Rotua Sianturi (2008) melakukan penelitian berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penciptaan Kesempatan Kerja di Provinsi Sumatera Utara Sebelum dan Pada Masa Otonomi Daerah (1994-2007), disimpulkan bahwa PDRB memberikan pengaruh yang positif terhadap penciptaan kesempatan kerja di Sumatera Utara, karena dengan meningkatnya PDRB akan memicu peningkatan terhadap tenaga kerja untuk dapat terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

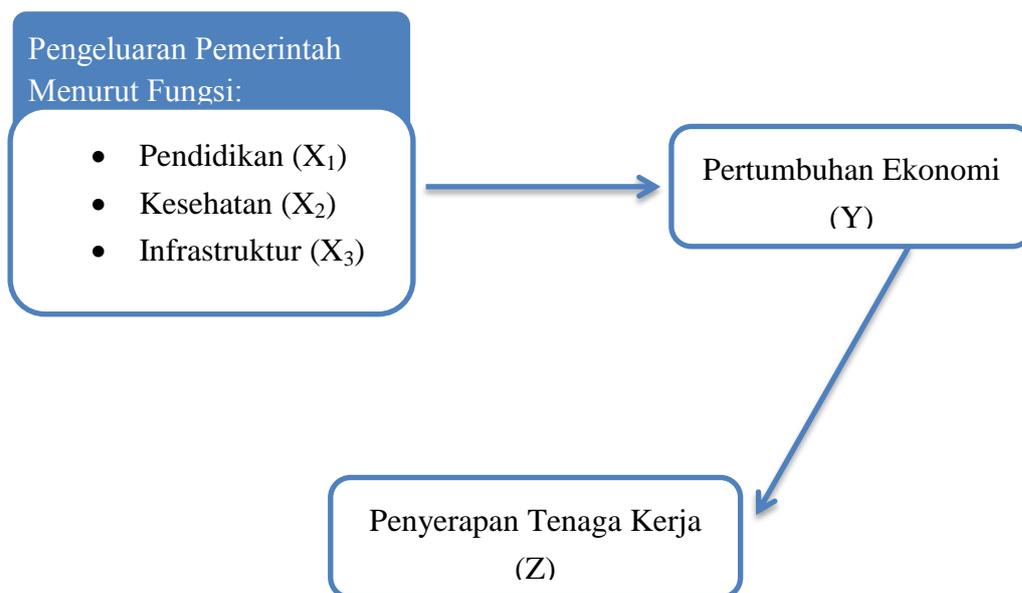
Gatot Setio dan I Made Suryana melakukan penelitian berjudul Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi menggunakan data panel seluruh kabupaten/kota Provinsi Bali periode 2006-2010. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja di Provinsi Bali. Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi signifikan, namun lemah terhadap kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh lemah terhadap kesempatan kerja.

Beberapa peneliti sebelumnya melakukan penelitian berkaitan dengan hubungan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan metode ECM hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk transportasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan dan perumahan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah, PDRB dan investasai terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan menggunakan metode analisis data panel, hasilnya menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan investasi berpengaruh lemah terhadap penyerapan tenaga kerja.

Penelitian sebelumnya dilakukan secara terpisah. Dalam penelitian ini akan dilakukan secara simultan melihat hubungan pengeluaran pemerintah terutama pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya melihat pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja.

Kerangka Pikir

Secara teori kenaikan pengeluaran pemerintah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dijelaskan oleh Todaro (2000) bahwa dengan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi akan dapat pula memaksimalkan penyerapan tenaga kerja. Penelitian melihat pengaruh pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, serta pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja, maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka pikir

Hipotesis Penelitian

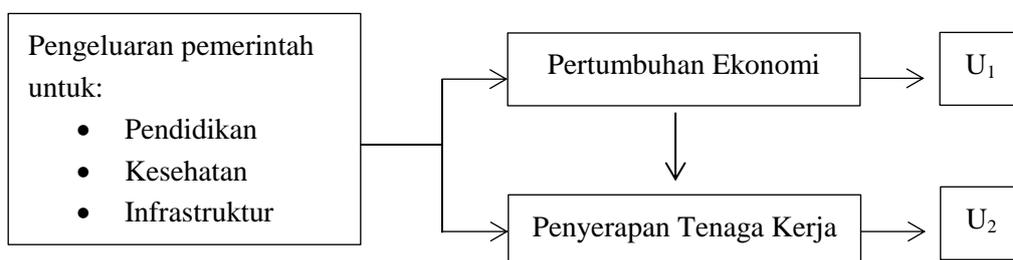
Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tahun 2011 mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2012.

2. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat tahun 2012.
3. Pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tahun 2011 mempunyai pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat tahun 2012.

Penelitian ini menggunakan data *cross section* meliputi 26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), antara lain: Pengeluaran Pemerintah Daerah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah daerah untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tahun 2011 terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat tahun 2012 adalah model simultan rekursif, dengan menggunakan bantuan software *Eviews 6.0*.



Gambar 3. Model rekursif penelitian

Model Penelitian

Model persamaan simultan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$\begin{aligned} \text{LnPDRB}_i &= \alpha_0 + \alpha_1 \text{LnPendidikan}_i + \alpha_2 \text{LnKesehatan}_i \\ &+ \alpha_3 \text{LnInfrastruktur}_i + \varepsilon_{1i} \end{aligned} \quad (1)$$

$$\text{LnTK}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{LnPDRB}_i + \varepsilon_{2i} \quad (2)$$

Persamaan reduksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$\begin{aligned} \text{LnPDRB}_i &= \theta_0 + \theta_1 \text{LnPendidikan}_i + \theta_2 \text{LnKesehatan}_i \\ &+ \theta_3 \text{LnInfrastruktur}_i + \varepsilon_{3i} \end{aligned} \quad (3)$$

Keterangan:

- LnPDRB : Nilai logaritma natural Produk Domestik Regional Bruto tahun 2012
- LnPendidikan : Nilai logaritma natural pengeluaran pemerintah daerah fungsi pendidikan tahun 2011
- LnKesehatan : Nilai logaritma natural pengeluaran pemerintah daerah fungsi kesehatan tahun 2011
- LnInfrastruktur : Nilai logaritma natural pengeluaran pemerintah daerah fungsi infrastruktur tahun 2011
- LnTK : Nilai logaritma natural jumlah tenaga kerja tahun 2012

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Model persamaan simultan rekursif yang dibangun dari dua persamaan struktural dan satu persamaan reduksi, yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012. Berdasarkan hasil identifikasi *order condition* (tabel 2, lampiran 4) dan *rank condition* (tabel 3, lampiran 5) menunjukkan bahwa model persamaan simultan adalah *overidentified* sehingga estimasi persamaan simultan rekursif pada penelitian ini dilakukan dengan metode *Two Stage Least Square* (2SLS).

Hasil estimasi model persamaan struktural dan model persamaan reduksi dapat dilihat pada tabel 4 (lampiran 4). Ketiga persamaan dapat ditulis sebagai berikut:

Persamaan struktural I:

$$\begin{aligned} \text{LnPDRB}_i = & 2,9634 + 0,6371 \text{LnPendidikan}_i^* + 0,0947 \text{LnKesehatan}_i \\ & (0,2829) \quad (0,0001) \quad (0,7393) \\ & + 0,3923 \text{LnInfrastruktur}_i^* \\ & (0,0120) \end{aligned} \quad (4)$$

Persamaan struktural II:

$$\text{LnTK}_i = -2,7585 + 0,9983 \text{LnPDRB}_i^* \quad (5)$$

(0,2705) (0,0000)

Persamaan Reduksi III:

$$\text{LnTK}_i = 0,4781 + 0,6080 \text{LnPendidikan}_i^* + 0,0215 \text{LnKesehatan}_i$$

(0,7869) (0,0000) (0,9067)

$$+ 0,4716 \text{LnInfrastruktur}_i^* \quad (6)$$

(0,0001)

Berdasarkan persamaan struktural pertama, peningkatan pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan tahun 2011 akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen. Setiap peningkatan pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan tahun 2011 sebesar 1 persen, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2012 sebesar 0,64 persen pada saat kondisi variabel lain *ceteris paribus*.

Pengeluaran untuk fungsi infrastruktur tahun 2011 memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2012. Dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen, dapat disimpulkan bahwa setiap peningkatan pengeluaran pemerintah untuk fungsi infrastruktur tahun 2011 sebesar 1 persen, akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat sebesar 0.39 persen pada tahun 2012. Kondisi tersebut berlaku saat variabel lain *ceteris paribus*.

Sedangkan pengeluaran pemerintah untuk fungsi kesehatan tahun 2011 tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2012. Pengeluaran pemerintah untuk fungsi kesehatan meliputi program pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, program perbaikan gizi, program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan dan lainnya. Namun, pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan tidak secara otomatis akan langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Persamaan struktural kedua menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi memiliki

pengaruh positif yang signifikan secara statistik terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen, pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,99 persen.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses penambahan kemampuan suatu daerah untuk memproduksi barang dan jasa. Sesuai dengan teori ekonomi makro bahwa dengan tumbuhnya ekonomi diperlukan tambahan input khususnya tenaga kerja sehingga permintaan akan tenaga kerja semakin meningkat yang kemudian dapat menciptakan kesempatan kerja.

Pengaruh pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap penyerapan tenaga kerja ditunjukkan pada persamaan reduksi, persamaan tersebut memiliki nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,7548. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk fungsi pendidikan dan infrastruktur tahun 2011 berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat tahun 2012.

Pengeluaran untuk fungsi pendidikan ditujukan untuk pemerataan pendidikan bagi semua kalangan sehingga akan semakin banyak SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas akan memiliki probabilitas lebih besar untuk memasuki pasar kerja sehingga pada akhirnya akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pengeluaran pemerintah untuk fungsi infrastruktur digunakan untuk program pembangunan jalan dan jembatan, program pengendalian banjir, program perbaikan akibat bencana alam dan lainnya. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur merupakan proyek besar dan melibatkan banyak pihak sehingga membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Hal ini berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, kondisi infrastruktur yang baik akan meningkatkan iklim usaha dan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perluasan penyerapan tenaga kerja.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan infrastruktur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- Pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja, karena pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
- Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan infrastruktur juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan adalah pemerintah daerah sebaiknya lebih meningkatkan alokasi pengeluarannya untuk infrastruktur yang tergolong masih rendah tanpa mengabaikan fungsi lainnya, Selain itu pemerintah perlu melakukan pengontrolan terhadap pemanfaatan pengeluaran pemerintah daerah tersebut agar dapat diperoleh hasil yang optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat masih banyak yang tidak sesuai dengan anggaran. Selain itu, dalam penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pengeluaran pemerintah untuk fungsi lainnya, seperti fungsi pelayanan umum, lingkungan hidup, dan perlindungan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

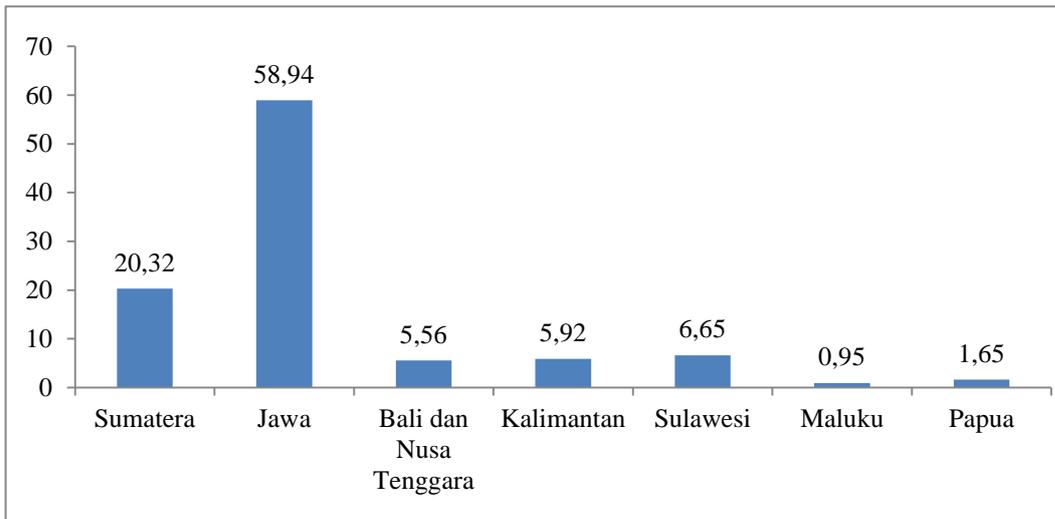
- Agustina, M. & I Gusti, B.I. (2014). Pengaruh Otonomi Daerah, Belanja Pemerintah, dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi Bali Tahun 1993-2012. *E-Jurnal EP Unud*..

- Ariesty, Widarty. (2010). *Perkembangan Kawasan Industri Jababeka dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Cikarang 1989-2000*. [Skripsi]. Bandung: Universitas pendidikan Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Jawa Barat dalam Angka 2012*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Jawa Barat dalam Angka 2013*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Keadaan Ketenagakerjaan Jawa Barat Agustus 2012*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2010-2011*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2011-2012*. Jakarta: BPS.
- Bastian. Desi D. (2010). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009*. [Skripsi]. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ferdinan, Hery. (2011) *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, PDRB dan Upah Riil Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Barat*. [Skripsi]. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Harijono, G.S. & I Made S.U. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi*. Bali: Universitas Udayana.
- Maharyasa, Putu S. (2013). *Kinerja Keuangan Daerah dan Pengaruh pengeluaran pemerintah Daerah Menurut Fungsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Pulau Jawa dan Bali Tahun 2004-2008*. [Skripsi]. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.
- Mankiw, N. Gregory. (2003). *Macroeconomics* 5th edition. New York: Worth Publisher.
- Saidah, Nur. (2011). *Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tertinggal*. [Skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

- Sianturi, Lisbeth R. (2008). *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penciptaan Kesempatan Kerja di Propinsi Sumatera Utara Sebelum dan Pada Masa Otonomi daerah (1997-2007)*. [Skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Sukirno, Sadono. (2004). *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
- Suryani, Timtim. (2013) Analisis Peran Sektor Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pematang (analisis Tabel Input Output Kabupaten Pematang Tahun 2010). *Economics Development Analysis Journal*, 2 (1).
- Todaro, Michael. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Edisi Ketujuh). Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

LAMPIRAN

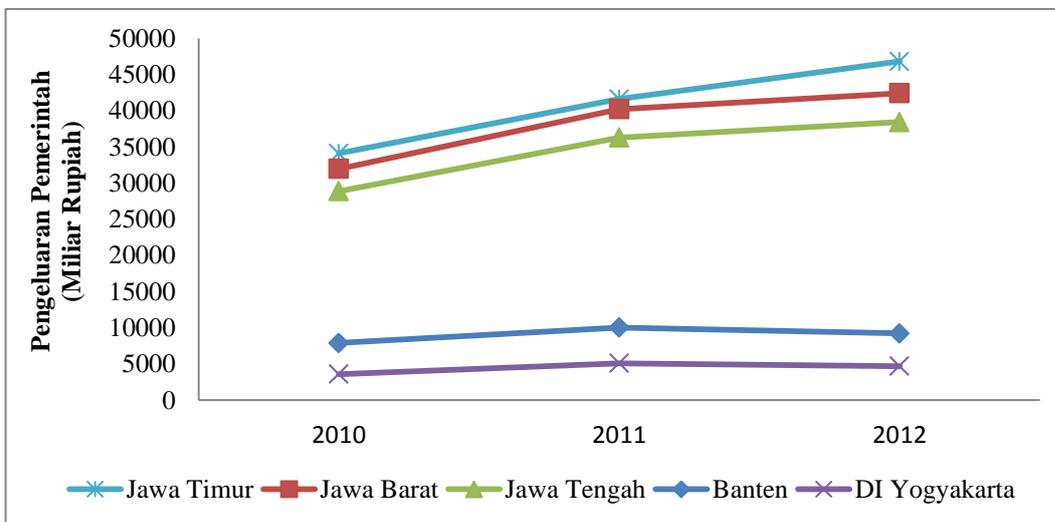
Lampiran 1



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 1. Persentase angkatan kerja menurut pulau tahun 2012

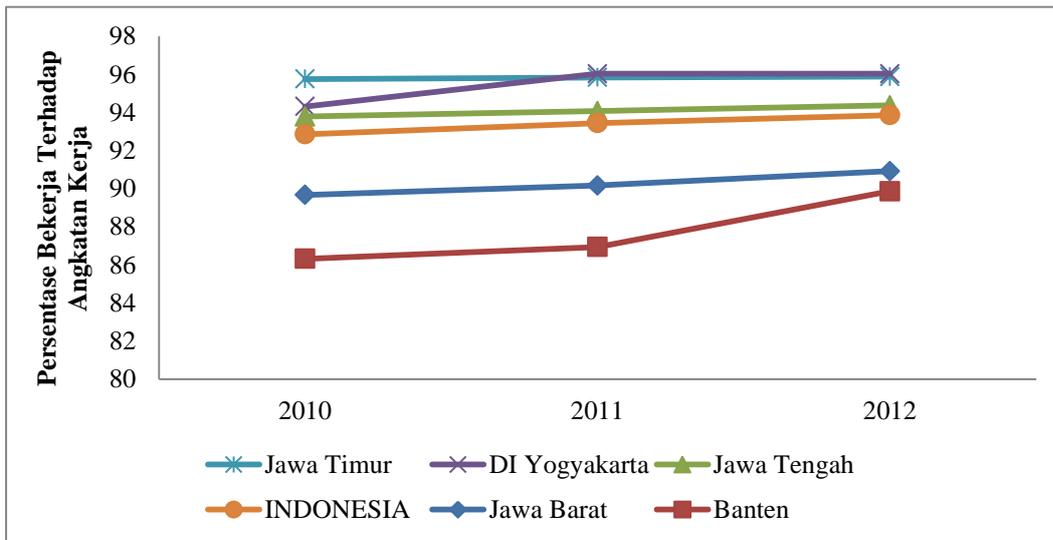
Lampiran 2



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 2. Realisasi pengeluaran daerah menurut provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2012 (miliar rupiah)

Lampiran 3



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 3. Persentase bekerja terhadap angkatan kerja menurut provinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2012

Lampiran 4

Tabel 2. Syarat *order condition* untuk masing-masing persamaan struktural

Persamaan	K-k	Tanda	m-1	Identifikasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ln(PDRB)	3-3	=	1-1	<i>Just identified</i>
Ln(TK)	3-0	>	2-1	<i>Overidentified</i>

Lampiran 5

Tabel 3. Syarat *rank condition* untuk masing-masing persamaan struktural

Persamaan	R(A)	Tanda	M-1	K-k(≠)m-1	Identifikasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ln(PDRB)	1	=	1	=	<i>Just identified</i>
Ln(TK)	1	=	1	>	<i>Overidentified</i>

Lampiran 6

Tabel 4. Hasil estimasi model persamaan struktural dan model persamaan reduksi

Persamaan	Variabel Endogen	Variabel Eksogen	Koefisien	Ringkasan Statistik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persamaan Struktural					
I	LnPDRB	C	2,9634	R-squared	0,5965
		LnPendidikan	0,6371 *	Adj R-squared	0,5414
		LnKesehatan	0.0947	Prob(F-statistic)	0,0001
		LnInfrastruktur	0.3923 *		
II	LnTK	C	-2,7585	R-squared	0,5558
		LnPDRB	0,9983 *	Adj R-squared	0,5372
				Prob(F-statistic)	0,0000
Persamaan Reduksi					
III	LnTK	C	0,4781	R-squared	0,7842
		LnPendidikan	0,6080 *	Adj R-squared	0,7548
		LnKesehatan	0,0215	Prob(F-statistic)	0,0000
		LnInfrastruktur	0.4716 *		

Catatan: *signifikan pada taraf nyata 5 persen